

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) merupakan kelembagaan yang memiliki peran strategis dalam mengelola masjid dalam mengelola masjid yang difungsikan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial umat Islam. Dalam praktiknya, DKM tidak hanya bertugas menyelenggarakan kegiatan ibadah, tetapi juga berperan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembinaan keagamaan dan sosial bagi jamaah. Hal ini menunjukkan bahwa masjid, melalui peran kelembagaan DKM, tidak sekadar berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, melainkan sebagai institusi sosial yang memiliki kontribusi penting dalam membangun kehidupan keagamaan dan kohesi sosial masyarakat.¹

Jika dilihat sejarahnya, sejak masa Rasulullah SAW di Madinah, masjid telah berfungsi sebagai pusat peradaban umat Islam yang tidak hanya melayani kebutuhan spiritual. Masjid pada masa itu juga menjadi ruang pendidikan, musyawarah, dan penyelesaian konflik sosial. Dengan demikian, masjid memiliki dua dimensi utama yang tidak terpisahkan, yaitu dimensi spiritual (hubungan manusia dengan Tuhan) dan dimensi sosial (hubungan antar manusia).²

Hasil dari berbagai penelitian, masjid memiliki peran penting dalam membangun komunitas dan memperkuat integrasi sosial. Penelitian oleh Basia Spalek dan Laura McDonald menunjukkan bahwa masjid berfungsi sebagai pusat pembangunan komunitas (community building) yang memperkuat identitas keagamaan serta jaringan sosial umat³. Sejalan dengan itu, Farah Naz menegaskan bahwa masjid memiliki peran luas sebagai pusat aktivitas keagamaan, pendidikan, dan interaksi sosial dalam masyarakat Muslim.⁴

Selain itu, Syfa Nur Malawati dan Fauzi Arif menunjukkan bahwa program pembinaan yang terstruktur di masjid mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan

¹ Farah Naz, "The Role of the Mosque in Muslim Society," *International Journal of Humanities and Social Science*, 2015.: 21-27

² Ibid.

³ Basia Spalek & Laura McDonald, "Preventing Terrorism: Muslim and Community Engagement," *Journal of Muslim Minority Affairs* 30, no. 3 (2010):123-131

⁴ Farah Naz, "The Role of the Mosque in Muslim Society," *International Journal of Humanities and Social Science*, 2015.: 21-27

keagamaan.⁵ Sementara itu, Muhammad Hizbullah dkk. menegaskan bahwa DKM memiliki peran penting dalam membangun solidaritas umat melalui kegiatan sosial yang terorganisir.⁶ Ulfa Masamah juga menunjukkan bahwa masjid dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan sosial.⁷

Secara teoritis, fungsi sosial masjid dapat dipahami melalui perspektif sosiologi, khususnya melalui konsep skema AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Dalam kerangka ini, setiap sistem sosial, termasuk masjid sebagai institusi keagamaan, harus mampu menjalankan empat fungsi utama, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola).⁸ Fungsi adaptasi terlihat dari kemampuan masjid dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, misalnya melalui penyediaan fasilitas ibadah dan program yang relevan dengan kondisi jamaah. Fungsi pencapaian tujuan tampak dalam upaya masjid, melalui DKM, untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, pengajian, dan pendidikan Al-Qur'an guna meningkatkan kualitas religius masyarakat.

Selanjutnya, fungsi integrasi tercermin dalam peran masjid sebagai ruang yang menyatukan berbagai elemen masyarakat melalui interaksi sosial, sehingga tercipta solidaritas, kebersamaan, dan keteraturan sosial. Adapun fungsi *latency* (pemeliharaan pola) berkaitan dengan upaya masjid dalam menjaga dan menanamkan nilai-nilai keagamaan serta norma sosial secara berkelanjutan melalui kegiatan pembinaan. Namun, apabila keempat fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal, maka dapat muncul ketidakseimbangan dalam sistem sosial, seperti rendahnya partisipasi jamaah dan melemahnya hubungan sosial di masyarakat. Dengan demikian, teori AGIL memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana masjid sebagai institusi sosial menjalankan perannya dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat.⁹

Dalam konteks Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa masjid memiliki potensi besar sebagai pusat pembinaan keagamaan dan sosial. Penelitian Faizal dkk. mengungkapkan bahwa

⁵ Syfa Nur Malawati & Fauzi Arif, "Peran Masjid Imaduddin dalam Pembinaan Masyarakat," Universitas Islam Bandung.

⁶ Muhammad Hizbullah et al., "Peran Dewan Kemakmuran Masjid dalam Membangun Solidaritas Umat."

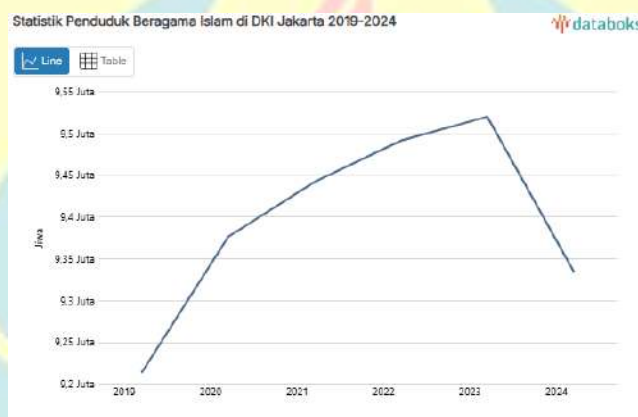
⁷ Ulfa Masamah, "Masjid, Peran Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat."

⁸ Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951)

⁹ George Ritzer & Jeffrey Stepnisky, *Sociological Theory*

masjid dapat menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang memberdayakan jamaah.¹⁰ Senada dengan itu, Sutriyono menemukan bahwa kegiatan rutin seperti pengajian, pendidikan Al-Qur'an, dan kegiatan sosial berkontribusi dalam meningkatkan kualitas keagamaan dan kehidupan masyarakat.¹¹ Penelitian lain oleh Mochammad Rojalul Amin A.Z. dkk. juga menegaskan bahwa masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹²

Gambar 1.1 Statistik Penduduk Beragama Islam di DKI Jakarta 2019-2024



Sumber: Databoks 2025

Dibandingkan dengan wilayah non-urban, dinamika peran masjid lebih rumit dalam konteks wilayah perkotaan seperti Jakarta. Secara demografis, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, tingkat partisipasi dalam aktivitas keagamaan tidak selalu sebanding dengan jumlah tersebut. Berdasarkan data Kementerian Agama yang dirilis melalui Databoks, jumlah penduduk beragama Islam di DKI Jakarta pada tahun 2024 mencapai sekitar 9,33 juta jiwa atau sebesar 83,83% dari total populasi 11,14 juta jiwa (Darmawan, 2025)¹³. Data ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, potensi jamaah masjid sangat besar, namun secara kualitatif belum seluruhnya terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan di masjid.

¹⁰ Faizal et al., "Peran Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 2023:123 - 132

¹¹ Sutriyono, "Peran Masjid dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat," *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021:125 - 140

¹² Mochammad Rojalul Amin A.Z. et al., "Peran Masjid sebagai Pusat Kegiatan Sosial dan Keagamaan," Universitas Sunan Giri:58 - 64

¹³ Agus Dwi Darmawan, "Statistik Penduduk Beragama Islam di DKI Jakarta 2019–2024

Di sisi lain, karakteristik masyarakat urban di Jakarta ditandai oleh mobilitas yang tinggi, keberagaman latar belakang sosial, serta padatnya aktivitas pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut memengaruhi pola kehidupan keagamaan masyarakat, khususnya dalam keterlibatan pada aktivitas keagamaan yang bersifat kolektif. Meskipun mayoritas penduduk Jakarta beragama Islam, intensitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan keagamaan di masjid belum selalu sebanding dengan besarnya jumlah penduduk muslim. Hal ini menunjukkan bahwa religiositas masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aspek keyakinan (belief), tetapi juga tercermin melalui praktik keagamaan, pengalaman beragama, pengetahuan keagamaan, dan keterlibatan dalam kehidupan keagamaan bersama.¹⁴

Dalam konteks masyarakat urban, kesibukan bekerja, tingginya mobilitas, serta beragam tuntutan kehidupan modern sering kali membatasi kesempatan masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin di masjid. Akibatnya, pembinaan religiositas melalui aktivitas kolektif, seperti pengajian, pendidikan Al-Qur'an, kajian keislaman, dan kegiatan sosial keagamaan, menghadapi tantangan tersendiri. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan religiositas yang tidak hanya meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, rasa kebersamaan, serta ikatan antaranggota masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu, keberadaan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) menjadi sangat penting sebagai organisasi keagamaan yang bertugas merancang dan mengembangkan berbagai program pembinaan agar mampu meningkatkan religiositas jamaah sesuai dengan karakteristik masyarakat urban yang dinamis.¹⁶

Meskipun secara teoritis peran masjid sangat ideal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masjid mampu mengoptimalkan fungsi sosialnya sebagai suatu sistem sosial. Dalam perspektif teori sistem sosial yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, sebuah institusi seperti DKM agar dapat bertahan dan berfungsi efektif harus menjalankan empat fungsi imperatif secara seimbang: *Adaptation* (adaptasi terhadap lingkungan eksternal dan pengelolaan

¹⁴ Charles Y. Glock and Rodney Stark, *Religion and Society in Tension* (Chicago: Rand McNally, 1965).

¹⁵ Abdul Wahid Hasyim, "The Rise of the Mosque as a Reflection of the Religious Metamorphosis of Residential Residents," *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 21, no. 1 (2023): 1–22,

¹⁶ Abdul Wahid Hasyim, "The Rise of the Mosque as a Reflection of the Religious Metamorphosis of Residential Residents," *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 21, no. 1 (2023): 137–152, <https://doi.org/10.24090/ibda.v21i1.7894>

sumber daya), *Goal Attainment* (penetapan dan pencapaian tujuan), *Integration* (koordinasi dan pemeliharaan solidaritas antar komponen sistem), dan *Latency / Pattern Maintenance* (pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai budaya). Idealnya, DKM masjid mampu mengadaptasi program dengan kebutuhan jamaah urban (A), menetapkan target pembinaan yang terukur (G), menyatukan jamaah dari latar belakang berbeda (I), serta menanamkan nilai keislaman lintas generasi (L). Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masjid mampu mengoptimalkan keempat fungsi tersebut secara simultan. Banyak masjid lebih berfokus pada fungsi pencapaian tujuan (misalnya rutinitas ibadah harian) tanpa diimbangi fungsi integrasi dan pemeliharaan pola yang membangun relasi sosial.

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Babussalam yang terletak di Komplek Bambu Duri, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat urban kelas menengah hingga menengah ke atas dengan tingkat mobilitas yang tinggi, heterogenitas sosial, serta kecenderungan interaksi sosial yang relatif terbatas. Berdasarkan observasi awal peneliti, Masjid Babussalam merupakan satu-satunya masjid di kawasan Komplek Bambu Duri yang menyelenggarakan berbagai program pembinaan keagamaan dan sosial, seperti pengajian rutin, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta kegiatan sosial pada bulan Ramadan. Selain itu, warga komplek Bambu duri juga memiliki kapasitas untuk menggunakan teknologi sehingga masjid Babussalam juga menerapkan sistem *hybrid* dalam pelaksanaan kegiatan dakwah. Kondisi tersebut menjadikan Masjid Babussalam sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji peran kelembagaan DKM dalam menjalankan pembinaan keagamaan dan sosial di tengah karakteristik masyarakat urban.

Namun, temuan observasi awal menunjukkan sebuah kontradiksi yang menarik. Seluruh program yang dirancang dan dijalankan DKM Masjid Babussalam – mulai dari pengajian rutin, TPA, distribusi ZIS, hingga takjil Ramadhan – sesungguhnya ditargetkan untuk masyarakat Komplek Bambu Duri sendiri. DKM telah berupaya maksimal menyediakan fasilitas dan kegiatan yang relevan. Akan tetapi, realitas di lapangan justru memperlihatkan bahwa warga komplek lah yang kurang merespon. Partisipasi mereka rendah; minat untuk hadir dalam pengajian, mengikuti kajian, atau terlibat dalam kegiatan sosial masjid sangat terbatas. Bukan karena program tidak tersedia atau tidak berkualitas, melainkan karena dari sisi warga komplek

sendiri terdapat semacam jarak, baik karena kesibukan, gaya hidup individualistik, atau pandangan bahwa kegiatan keagamaan kolektif bukanlah prioritas.

Kondisi ini mencerminkan gejala rendahnya religiusitas dalam tataran praktis di lingkungan kelas menengah urban. Warga Komplek Bambu Duri yang mayoritas berstatus sosial-ekonomi menengah ke atas cenderung mengalami penyempitan ruang dan waktu untuk aktivitas keagamaan bersama. Interaksi sosial yang terjadi di lingkungan kompleks pun sangat terbatas; tidak ada tradisi berkumpul, mengobrol santai, atau gotong royong yang rutin. Individualisme menjadi pola hidup yang dominan. Dalam konteks inilah, DKM Masjid Babussalam dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana, yaitu bagaimana menjalankan peran DKM dalam pembinaan keagamaan dan sosial jamaah masjid Bambu Duri sesuai dengan fungsi utama DKM. Dalam studi manajemen masjid, peran DKM mencakup tiga fungsi utama: *idarah* (administrasi), *'imarah* (aktivitas keagamaan dan sosial), dan *ri'ayah* (pemeliharaan sarana).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana DKM sebagai lembaga keagamaan mampu mempertahankan eksistensi dan fungsi sosial masjid di tengah perubahan karakter masyarakat urban. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, masjid tidak lagi hanya menghadapi persoalan penyediaan fasilitas ibadah, tetapi juga tantangan dalam membangun keterlibatan sosial masyarakat yang cenderung sibuk, heterogen, dan individualis. Kondisi tersebut menjadikan penelitian mengenai peran DKM semakin relevan, karena keberhasilan masjid dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan sangat bergantung pada kemampuan kelembagaan DKM dalam mengelola program, membangun relasi sosial, serta menciptakan ruang interaksi yang mampu menarik partisipasi jamaah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai penting tidak hanya secara akademis, tetapi juga secara praktis sebagai bahan evaluasi dan pengembangan strategi pengelolaan masjid di masyarakat urban modern.

Selain memiliki urgensi, penelitian ini juga memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai masjid cenderung berfokus pada efektivitas program keagamaan, manajemen masjid, atau tingkat partisipasi jamaah secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menempatkan DKM sebagai fokus utama

analisis kelembagaan dalam konteks masyarakat urban kelas menengah yang cenderung individualis. Penelitian ini juga menggunakan perspektif AGIL Talcott Parsons untuk melihat bagaimana DKM menjalankan fungsi adaptasi (adaptation), pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), dan pemeliharaan pola (latency/pattern maintenance) dalam pembinaan sosial-keagamaan jamaah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat program yang dijalankan, tetapi juga menelaah bagaimana DKM mempertahankan keseimbangan sistem sosial masjid di tengah perubahan sosial masyarakat urban.

Berangkat dari kontradiksi antara upaya maksimal DKM (dengan berbagai program yang sudah tersedia) dan respons minimal dari masyarakat kompleks, penelitian ini tidak akan berhenti pada penghitungan angka partisipasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, karena yang ingin dipahami bukanlah "berapa persen tingkat partisipasi", melainkan "mengapa partisipasi rendah dan bagaimana DKM mengatasinya dari perspektif sistem sosial." Dengan menggunakan kerangka AGIL Talcott Parsons, penelitian ini akan menganalisis bagaimana DKM Masjid Babussalam menjalankan fungsi adaptasi (A), pencapaian tujuan (G), integrasi (I), dan pemeliharaan pola (L) dalam merespons rendahnya minat dan keterlibatan warga kompleks. Dengan demikian, penelitian ini hendak menggali makna, dinamika, dan strategi kelembagaan di balik fenomena tersebut, sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan peran DKM di lingkungan urban yang individualistik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terlihat adanya kontradiksi yang signifikan antara kesiapan program pembinaan yang dirancang oleh DKM Masjid Babussalam dengan rendahnya minat serta keterlibatan warga Komplek Bambu Duri yang memiliki karakteristik masyarakat urban cenderung individualistik. Fenomena ini mengindikasikan adanya tantangan struktural bagi DKM dalam menjalankan fungsinya sebagai sistem sosial yang utuh di tengah masalah tingkat religiusitas dalam tataran praktis. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud membedah dinamika tersebut melalui kerangka fungsionalisme struktural skema AGIL untuk melihat bagaimana keseimbangan sistem diupayakan guna mengoptimalkan peran pembinaan keagamaan dan sosial di tengah perubahan sosial masyarakat modern. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program kegiatan sosial dan keagamaan yang dijalankan oleh DKM Masjid Babussalam dalam membina jamaah?
2. Bagaimana peran kelembagaan DKM Masjid Babussalam dalam menjalankan fungsi Adaptation (adaptasi), Goal Attainment (pencapaian tujuan), Integration (integrasi), dan Latency (pemeliharaan pola) dalam pembinaan sosial-keagamaan jamaah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan program dan implementasi kegiatan sosial-keagamaan yang dijalankan oleh DKM Masjid Babussalam dalam membina jamaah.
2. Menganalisis peran kelembagaan DKM Masjid Babussalam dalam menjalankan fungsi Adaptation (adaptasi), Goal Attainment (pencapaian tujuan), Integration (integrasi), dan Latency (pemeliharaan pola) dalam pembinaan sosial-keagamaan jamaah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi agama, khususnya mengenai peran masjid sebagai institusi sosial-keagamaan dalam masyarakat urban. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) melalui perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dengan skema AGIL. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pembinaan sosial-keagamaan di lingkungan masjid.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris kepada pengurus DKM Masjid Babussalam mengenai pelaksanaan program pembinaan sosial-keagamaan yang telah dijalankan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi DKM dalam meningkatkan partisipasi jamaah serta mengembangkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelolaan masjid di lingkungan perkotaan dalam memperkuat fungsi sosial dan keagamaan masjid.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam kegiatan sosial-keagamaan di masjid. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung peran masjid sebagai ruang pembinaan, interaksi sosial, dan penguatan solidaritas masyarakat di tengah kehidupan urban yang cenderung individualis. Dengan demikian, masjid dapat berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan sosial-keagamaan masyarakat secara berkelanjutan.

1.5 Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan tema peran kelembagaan masjid, khususnya Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dalam pembinaan keagamaan dan sosial masyarakat. Kajian ini penting dilakukan untuk memahami posisi penelitian yang akan dilakukan, baik dalam konteks penguatan teori maupun dalam mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, tinjauan literatur juga berfungsi sebagai dasar konseptual dalam menyusun kerangka analisis yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga penelitian ini memiliki arah yang jelas dan sistematis.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks tersebut, DKM sebagai pengelola masjid memiliki peran strategis dalam merancang, mengorganisasi, dan menjalankan program pembinaan keagamaan serta membangun relasi sosial antarjamaah. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek program dan hasil kegiatan, sehingga belum banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana proses kelembagaan DKM bekerja sebagai suatu sistem sosial yang dinamis dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung melihat peran masjid secara normatif atau administratif, sehingga belum banyak yang mengaitkannya dengan perspektif sosiologis yang lebih komprehensif. Padahal, melalui pendekatan fungsionalisme struktural

dalam kerangka AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, masjid dapat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang harus mampu menjalankan fungsi adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan pemeliharaan pola (*latency*). Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat melihat tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh DKM, tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan sosial, memperkuat solidaritas, serta mempertahankan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, melalui tinjauan literatur ini, peneliti berupaya mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kontribusi dari masing-masing penelitian terdahulu, sehingga dapat memperjelas posisi dan kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Tinjauan ini juga menjadi dasar dalam merumuskan kerangka berpikir penelitian yang lebih sistematis dan terarah. Dengan demikian, peran kelembagaan DKM dapat dipahami sebagai proses sosial yang dinamis dalam kerangka fungsi AGIL, terutama dalam konteks masyarakat urban yang memiliki karakteristik heterogen dan cenderung individual.

Skema 1.1 Kategorisasi Literatur



Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan Skema di atas, penelitian ini mengategorikan kajian literatur ke dalam tiga kelompok utama, yaitu Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), pembinaan keagamaan, dan pembinaan sosial. Dewan Kemakmuran Masjid ditempatkan sebagai konsep utama penelitian yang merujuk pada peran lembaga pengelola masjid dalam mengatur, mengembangkan, dan memakmurkan masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam. Kategori ini didasarkan pada penelitian Hizbullah dkk. (2022) yang menjelaskan bahwa DKM memiliki fungsi strategis dalam

mengelola berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan maupun sosial masyarakat di lingkungan masjid.

Kategori pertama yang menjadi fokus turunan dari peran DKM adalah pembinaan keagamaan. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, pembinaan keagamaan dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keislaman seperti pengajian, kajian rutin, pendidikan Al-Qur'an, pembinaan akhlak, peringatan hari besar Islam, serta berbagai aktivitas dakwah lainnya. Literatur yang digunakan pada kategori ini antara lain penelitian Amin dkk. (2023), Ghazali dkk. (2023), Dammawan dkk. (2021), Haryu dkk. (2023), Alfattah dkk. (2023), Nazir dkk. (2020), Sutriyono (2021), Rahmawati dan Efendi (2025), yang secara umum menunjukkan bahwa masjid memiliki peran penting sebagai lembaga pendidikan nonformal dalam meningkatkan pemahaman agama, membentuk karakter Islami, serta memperkuat spiritualitas masyarakat.

Kategori kedua adalah pembinaan sosial, yaitu berbagai aktivitas yang dilakukan masjid untuk meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas sosial masyarakat. Pembinaan sosial tidak hanya berorientasi pada ibadah ritual, tetapi juga mencakup kegiatan kemanusiaan seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, santunan anak yatim, bantuan bagi kaum dhuafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya. Kajian ini didukung oleh penelitian Balabekina dkk. (2020), Karyakovskaya (2020), Karimullah dkk. (2023), Malawati dkk. (2022), dan Masamah (2020) yang menjelaskan bahwa masjid berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial yang mampu memperkuat integrasi sosial, meningkatkan kepedulian masyarakat, serta menjadi sarana penyelesaian berbagai persoalan sosial di lingkungan sekitar.

Melalui kategorisasi tersebut, dapat dipahami bahwa sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan DKM sebagai aktor utama yang menjalankan dua fungsi besar, yaitu fungsi keagamaan dan fungsi sosial. Kedua fungsi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena pembinaan keagamaan bertujuan membentuk kualitas spiritual masyarakat, sedangkan pembinaan sosial bertujuan mewujudkan kepedulian dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, skema ini menjadi dasar konseptual penelitian dalam menganalisis bagaimana peran Dewan Kemakmuran Masjid Babussalam Bambu Duri dalam melaksanakan pembinaan keagamaan dan pembinaan sosial kepada jamaah serta masyarakat sekitar masjid.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Dewan Kemakmuran Masjid

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan masjid sebagai institusi keagamaan sekaligus sosial. Peran ini mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi program-program keagamaan dan sosial yang ditujukan bagi jamaah. Dalam perspektif sosiologi organisasi, DKM dapat dipahami sebagai aktor utama yang menentukan sejauh mana masjid dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan masjid dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pengelolanya. DKM tidak hanya berperan dalam menghidupkan aktivitas ibadah, tetapi juga dalam mengembangkan kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Hal ini terlihat dalam penelitian Hizbullah dkk. yang menunjukkan bahwa pengelolaan masjid yang baik mampu meningkatkan partisipasi jamaah melalui program pembinaan yang terstruktur¹⁷.

Dalam konteks penelitian ini, DKM Masjid Babussalam diposisikan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam menggerakkan aktivitas masjid di tengah masyarakat urban Komplek Bambu Duri. Karakter masyarakat yang cenderung sibuk dan individualis menuntut DKM untuk tidak hanya menjalankan fungsi rutin, tetapi juga mampu merancang strategi yang adaptif agar masyarakat tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan masjid. Oleh karena itu, analisis terhadap peran DKM menjadi penting untuk memahami bagaimana kelembagaan masjid bekerja secara nyata dalam kehidupan sosial.

1.6.2 Pembinaan keagamaan

Pembinaan keagamaan merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan praktik keagamaan jamaah secara berkelanjutan. Kegiatan ini meliputi pengajian, dakwah, pendidikan Al-Qur'an, serta pembinaan akhlak yang bertujuan membentuk individu yang religius dan

¹⁷ Hizbullah, M., Haidir, Yeltriana, & Harahap, S. B. (2022). Optimalisasi peran dan fungsi masjid dalam kegiatan dakwah: Studi kasus di Masjid Bandar Klippa.

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut M. Quraish Shihab, pembinaan keagamaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan agama, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menghasilkan perubahan perilaku yang nyata dalam masyarakat.¹⁸

Dalam konteks penelitian ini, pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh DKM Masjid Babussalam menjadi instrumen penting dalam menarik minat masyarakat urban untuk kembali aktif beribadah di masjid. Melalui program yang terstruktur dan relevan dengan kebutuhan jamaah, DKM berperan sebagai agen yang menjembatani antara nilai-nilai keagamaan dan realitas kehidupan masyarakat modern. Dengan demikian, efektivitas pembinaan keagamaan dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu meningkatkan partisipasi jamaah serta membangun kesadaran kolektif dalam kehidupan beragama.¹⁹

1.6.3 Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, solidaritas, dan kepedulian antarjamaah melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. Bentuk pembinaan sosial ini mencakup kegiatan seperti santunan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, bantuan kemanusiaan, serta kegiatan gotong royong yang melibatkan masyarakat sekitar. Menurut Zygmunt Bauman, dalam masyarakat modern yang cenderung individualistik, ruang-ruang sosial seperti masjid memiliki peran penting dalam membangun kembali ikatan sosial yang mulai melemah akibat perubahan sosial.²⁰

Dalam penelitian ini, pembinaan sosial yang dilakukan oleh DKM Masjid Babussalam menjadi strategi penting dalam mengatasi karakteristik masyarakat urban yang cenderung individualis. Kegiatan sosial yang bersifat kolektif tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan material masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk membangun kembali interaksi sosial dan rasa kebersamaan. Dengan demikian, pembinaan sosial menjadi bagian integral dari

¹⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007).

¹⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London: Routledge, 2006).

²⁰ Zygmunt Bauman, *Community: Seeking Safety in an Insecure World* (Cambridge: Polity Press, 2001).

upaya DKM dalam menghidupkan fungsi sosial masjid serta memperkuat hubungan antarjamaah di lingkungan Komplek Bambu Duri.²¹

1.6.4 Teori Sistem Sosial Talcott Parsons

Teori Sistem Sosial Talcott Parsons berangkat dari perspektif struktural fungsional yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai struktur atau lembaga sosial yang saling berkaitan dan menjalankan fungsi tertentu demi menjaga keteraturan serta keberlangsungan kehidupan sosial. Dalam perspektif ini, setiap institusi sosial tidak dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki kontribusi terhadap terciptanya keseimbangan (*social equilibrium*). Dengan demikian, keberadaan suatu lembaga dinilai dari fungsi yang dijalankannya dalam menopang stabilitas dan keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan.²²

Selain mengembangkan teori sistem sosial, Talcott Parsons juga mengemukakan *Voluntaristic Theory of Action* atau teori tindakan sosial voluntaristik. Menurut Parsons, tindakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar oleh aktor untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan situasi yang dihadapi serta berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku. Dalam perspektif ini, individu maupun kelompok dipandang sebagai aktor yang memiliki kemampuan memilih berbagai alternatif tindakan guna mencapai tujuan yang diinginkan.²³

Parsons menjelaskan bahwa tindakan sosial terdiri atas beberapa unsur pokok, yaitu aktor (*actor*), tujuan (*goal*), situasi (*situation*), sarana (*means*), serta nilai dan norma (*norms and values*). Kelima unsur tersebut saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial. Dengan demikian, suatu tindakan tidak dipandang sebagai perilaku yang terjadi secara otomatis, melainkan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar, terarah, dan dipengaruhi oleh kondisi sosial serta sistem nilai yang dianut oleh aktor.

²¹ Bryan S. Turner, *Religion and Modern Society: Citizenship, Secularisation and the State* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

²² George Ritzer & Jeffrey Stepnisky, *Sociological Theory*, 11th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2022), hlm. 231–238.

²³ Talcott Parsons, "Actor, Situation and Normative Pattern: An Essay in the Theory of Social Action," *Studi Sosiologi*, November 4, 2010

Dalam penelitian ini, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Babussalam dipahami sebagai aktor kolektif yang secara sadar menyelenggarakan berbagai program pembinaan keagamaan dan sosial bagi jamaah. Berbagai kegiatan seperti pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), peringatan hari besar Islam, serta kegiatan sosial lainnya merupakan bentuk tindakan sosial voluntaristik yang dipilih DKM untuk mencapai tujuan pembinaan religiositas dan penguatan solidaritas sosial masyarakat. Pelaksanaan berbagai program tersebut dipengaruhi oleh kondisi masyarakat urban Komplek Bambu Duri serta berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi pedoman bagi pengurus dan jamaah.

Parsons mengembangkan perspektif struktural fungsional dengan menekankan bahwa suatu sistem sosial hanya dapat bertahan apabila mampu memenuhi sejumlah kebutuhan fungsional yang bersifat mendasar. Pemikiran tersebut kemudian dirumuskan ke dalam skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency/Pattern Maintenance) sebagai seperangkat prasyarat fungsional (*functional prerequisites*) yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial agar tetap mampu mempertahankan keseimbangan dan eksistensinya. Oleh karena itu, skema AGIL bukan merupakan teori yang berdiri sendiri, melainkan kerangka analisis yang dikembangkan Parsons untuk menjelaskan bagaimana struktur-struktur sosial menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan dalam mempertahankan keberlangsungan suatu sistem sosial.²⁴

Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Setiap lembaga sosial memiliki fungsi tertentu agar keteraturan sosial dapat terjaga. Parsons menjelaskan bahwa agar suatu sistem dapat bertahan, maka sistem tersebut harus memenuhi empat kebutuhan pokok yang dikenal dengan skema AGIL, yaitu Adaptation (adaptasi), Goal Attainment (pencapaian tujuan), Integration (integrasi), dan Latency atau Pattern Maintenance (pemeliharaan pola nilai).²⁵ Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa stabilitas masyarakat tercapai apabila setiap institusi menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara seimbang.

²⁴ Talcott Parsons, *The Social System* (New York: The Free Press, 1951), hlm. 24–36; George Ritzer & Jeffrey Stepnisky, *Sociological Theory*, 11th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2022), hlm. 239–243.

²⁵ Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951)

Dalam konteks sosiologi agama, masjid dapat dipahami sebagai salah satu institusi sosial yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang pendidikan, interaksi sosial, serta pembinaan moral umat. Oleh karena itu, teori AGIL relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Babussalam menjalankan perannya sebagai pengelola lembaga keagamaan di tengah masyarakat urban Komplek Bambu Duri.²⁶

Fungsi Adaptation (adaptasi) berkaitan dengan kemampuan sistem menyesuaikan diri terhadap lingkungan eksternal dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks masjid, adaptasi terlihat dari kemampuan DKM menyusun program sesuai kondisi jamaah, seperti jadwal pengajian yang fleksibel, penggunaan media sosial, atau kegiatan sosial bagi warga sekitar. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta Timur yang masyarakatnya sibuk dan mobilitas tinggi, fungsi adaptasi menjadi penting agar masjid tetap relevan dan diminati jamaah.²⁷

Fungsi Goal Attainment (pencapaian tujuan) merujuk pada kemampuan lembaga menetapkan tujuan serta mencapainya melalui pengorganisasian sumber daya. Dalam konteks masjid, tujuan tersebut berupa peningkatan kualitas ibadah, bertambahnya partisipasi jamaah, dan berkembangnya kepedulian sosial masyarakat. Program seperti salat berjamaah, pengajian, TPA, dan penyaluran zakat merupakan bentuk konkret pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, DKM berperan sebagai pengarah organisasi agar visi keagamaan dan sosial masjid dapat tercapai.²⁸

Fungsi Integration (integrasi) berkaitan dengan kemampuan sistem menjaga hubungan harmonis antaranggota masyarakat. Masjid berpotensi menjadi ruang integrasi karena mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan usia dalam satu tempat yang sama. Melalui kegiatan berjamaah, gotong royong, majelis taklim, dan peringatan hari besar Islam, solidaritas sosial dapat diperkuat. Dalam konteks masyarakat urban yang cenderung individualis, fungsi integrasi ini sangat penting untuk membangun kebersamaan warga.²⁹

²⁶ George Ritzer, *Sociological Theory* (New York: McGraw-Hill, 2011)

²⁷ Kenneth Thompson, *The Early Sociology of Talcott Parsons* (London: Macmillan, 1989)

²⁸ Salahuddin El Ayyubi et al., "Zakat Empowerment of Cibuluh Batik Village Perspective Of 'Agil' Functional Structural Theory,"

²⁹ Anthony Giddens, *Sociology*

Fungsi Latency (pemeliharaan pola) berhubungan dengan proses pewarisan nilai, norma, dan motivasi sosial agar sistem tetap berjalan secara berkelanjutan. Dalam konteks masjid, fungsi ini terlihat melalui pendidikan agama, pembinaan akhlak, kegiatan remaja masjid, serta pembiasaan ibadah berjamaah. Masjid Babussalam dapat menjalankan fungsi ini melalui TPA, kajian Islam, dan kegiatan pembinaan generasi muda. Fungsi ini menjadi penting di tengah tantangan sekularisasi dan menurunnya keterikatan masyarakat kota terhadap nilai-nilai agama.³⁰

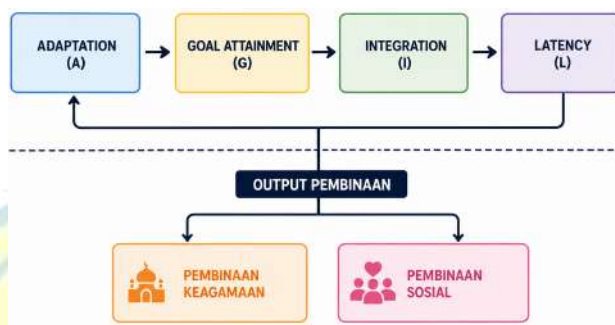
Dengan demikian, teori AGIL Talcott Parsons memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam penelitian ini. Peran kelembagaan DKM Masjid Babussalam tidak hanya dilihat dari kegiatan formal semata, tetapi juga dari kemampuannya beradaptasi dengan masyarakat urban, mencapai tujuan pembinaan, membangun integrasi sosial, serta memelihara nilai-nilai keagamaan masyarakat. Melalui pendekatan ini, masjid dipahami sebagai institusi sosial yang dinamis dan memiliki kontribusi penting dalam kehidupan masyarakat modern.

1.6.5 Hubungan Antar Konsep

Skema 1.2 hubungan antar Konsep



³⁰ Ian Craib, *Modern Social Theory*



Sumber: Olahan Peneliti

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait peran kelembagaan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam pembinaan keagamaan dan sosial jamaah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, proses, serta dinamika yang terjadi dalam konteks nyata di Masjid Babussalam. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis data bersifat induktif³¹. Selain itu, penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi, sehingga sangat relevan untuk mengkaji fenomena sosial keagamaan di masyarakat.

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Babussalam yang terletak di Komplek Bambu Duri, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017

masyarakat urban dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, mobilitas sosial yang dinamis, serta kecenderungan pola kehidupan yang individualis selain itu, Masjid Babussalam sendiri memiliki bermacam program kegiatan pembinaan keagamaan dan sosial. Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian ini relevan dengan fokus kajian mengenai partisipasi jamaah dan peran kelembagaan DKM dalam membangun pembinaan keagamaan dan sosial. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan mulai sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2026 yang mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data di lapangan, serta analisis data. Rentang waktu tersebut dianggap cukup untuk memperoleh data yang mendalam dan berkelanjutan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara lebih komprehensif.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas dan peran DKM Masjid Babussalam. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun subjek penelitian meliputi ketua dan pengurus DKM serta pengurus harian masjid. Teknik purposive sampling digunakan karena memungkinkan peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui informasi yang dibutuhkan.³²

Karakteristik informan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang pengurus DKM dan satu orang jamaah aktif yang berdomisili di sekitar Masjid Babussalam, khususnya di lingkungan Komplek Bambu Duri, sehingga memiliki kedekatan lokasi dan intensitas interaksi yang tinggi dengan kegiatan masjid. Informan berada pada rentang usia 24–58 tahun, yang terdiri dari kelompok dewasa muda (24 tahun) dan kelompok dewasa (43–58 tahun). Dari sisi profesi, informan memiliki latar belakang yang beragam, yaitu dokter, karyawan swasta, dan mahasiswa. Variasi usia, profesi, dan posisi kelembagaan tersebut dipilih agar penelitian memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai peran DKM dalam pembinaan keagamaan dan sosial jamaah.

³² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed

1.7.4 Peran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data. Peneliti melakukan observasi, wawancara, serta interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan. Peran peneliti sangat penting karena kualitas data sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam memahami dan menginterpretasikan fenomena sosial yang diteliti.³³ Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk memiliki kepekaan sosial serta mampu membangun hubungan yang baik dengan informan.

1.7.5 Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara triangulasi untuk meningkatkan validitas data. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas keagamaan seperti kegiatan peribadatan, dakwah, dan perayaan hari besar Islam dan kegiatan sosial di Masjid Babussalam seperti Shalat berjama'ah sebanyak 3 kali dan menemukan kegiatan shalat berjamaah hanya terdapat 2 *shaf* jamaah, kemudian peneliti juga ikut kepanitiaan hari raya Idul Adha sebanyak 1 kali, pada kegiatan itu sangat ramai yang berpartisipasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan terkait peran DKM dalam pembinaan jamaah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, foto, dan dokumen lainnya. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data.³⁴

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif bertujuan untuk mengorganisasi data sehingga dapat ditemukan pola dan makna dari fenomena yang diteliti.³⁵ Dalam penelitian ini, analisis juga dikaitkan dengan konsep AGIL untuk memahami peran DKM secara lebih komprehensi.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

³⁴ ⁵ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, McGraw-Hill, 1978.

³⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed

1.7.7 Triangulasi Data

Triangulasi data dilakukan untuk menguji keabsahan data penelitian. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Ketua DKM, pengurus DKM, dan jamaah. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab agar memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian. Penyusunan sistematika ini bertujuan untuk memberikan alur yang jelas dan terstruktur, sehingga pembaca dapat mengikuti proses penelitian secara runtut dari awal hingga akhir.

Bab I: Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan literatur, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar dalam memahami arah dan fokus penelitian yang dilakukan.

Bab II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian menjelaskan kondisi sosial wilayah Komplek Bambu Duri, profil Masjid Babussalam, struktur organisasi DKM, serta karakteristik informan penelitian. Bab ini memberikan konteks empiris yang menjadi latar belakang analisis dalam penelitian.

Bab III: Hasil Penelitian memaparkan temuan data yang diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil empiris yang akan menjadi dasar dalam proses analisis.

Bab IV: Analisis berisi pembahasan mendalam terhadap temuan penelitian dengan menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, khususnya melalui skema AGIL yang meliputi Adaptation (adaptasi), Goal Attainment (pencapaian tujuan), Integration (integrasi), dan Latency/Pattern Maintenance (pemeliharaan pola).

Bab V: Penutup memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pengelolaan masjid maupun penelitian selanjutnya. Dengan demikian, sistematika penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan sistematis mengenai penelitian yang dilakukan.



Intelligentia - Dignitas